

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai beragam karakteristik. Manusia memiliki perbedaan tingkatan sosial dan ekonomi, jenis kelamin, sistem hukum, suku, budaya, bangsa, agama, kepercayaan, aliran politik, dan tujuan hidupnya. Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, sebab manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar tentu pernah mengalami suatu pertentangan atau perbedaan dengan orang di sekitar. Pertentangan tersebut yang menjadi sebuah konflik dan jika tidak diselesaikan dan dibiarkan maka akan menjadi suatu masalah yang besar.<sup>1</sup>

Konflik berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti memukul. Sedangkan pengertian konflik secara sosiologis adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang saling berusaha untuk menyingkirkan satu sama lain.<sup>2</sup> Pengertian konflik berdasarkan tujuan menurut Soerjono Soekanto ialah pertentangan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan cara menentang pihak lawan. Sama dengan pendapat Soekanto, Lewis, A. Coser di dalam buku *The function of Social conflict*, yang mengatakan bahwa konflik ialah perjuangan nilai atau tuntutan atas status.<sup>3</sup> Max Weber mengartikan kata konflik sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang didalamnya terdapat perbuatan

---

<sup>1</sup> Indriana, N. 2017. "Pemetaan Konflik di Timur Tengah: (Tinjauan Geografi Politik)". *An-nas: Jurnal Humaniora*, Vol. 1, No. 1, hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.15.

<sup>3</sup> Indriana, *op.cit*

sengaja dilakukan atau diarahkan kepada keberatan pihak lain baik dengan menggunakan cara yang damai atau dengan cara kekerasan.<sup>4</sup>

Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih baik itu individu ataupun kelompok yang mempunyai atau memiliki tujuan-tujuan yang saling bertentangan (*incompatible*). Konflik akan muncul jika pihak-pihak tersebut mengejar tujuan yang bertentangan (*incompatible*) tersebut. Konflik merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia sebab konflik merupakan bagian yang berhubungan erat dari eksistensi manusia. Konflik muncul dari ketidakseimbangan di dalam hubungan-hubungan tersebut, yakni ketidakseimbangan dalam status sosial, kekayaan dan akses terhadap sumber-sumber dan juga ketidakseimbangan dalam kekuasaan yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kriminalitas.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan yang sering terjadi menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan terdapatnya perbedaan di setiap individu dalam interaksi sosial, maka dapat dikatakan bahwa konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya karena

---

<sup>4</sup> Afrizal. 2018. “*Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*”. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, hlm.5.

konflik hanya hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu.<sup>5</sup> Kusnaidi mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik terjadi yaitu terdapatnya perbedaan dalam berbagai aspek, terdapat bentrokan kepentingan dan adanya perubahan sosial yang tidak merata.<sup>6</sup>

Konflik merupakan suatu fenomena yang kompleks. Sebuah konflik tidak selalu diartikan sebagai bentuk pertikaian atau permusuhan, namun konflik juga bisa mengandung arti kompetisi, ketegangan atau ketidaksepahaman. Oleh karena itu konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang akan selalu melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Dalam mengidentifikasi sumber atau sebab konflik terdapat dua hal umum, yakni konteks terjadinya konflik dan sumber-sumber konflik. Konflik juga diartikan sebagai pertentangan yang memiliki kepentingan yang tidak bersesuaian. Menurut Karl Marx dan Ralf Dahrendorf konflik juga merupakan konflik kepentingan. Pertentangan kepentingan ini terjadi dalam suatu relasi sosial. Marx menekankan konflik pada relasi sosial produksi, sedangkan Dahrendorf menyatakan konflik ialah pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan ini terbagi ke dalam dua macam, yakni pertentangan kepentingan personal dan pertentangan kepentingan struktural. Kepentingan personal ialah ketidaksesuaian tujuan yang bersifat pribadi yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu relasi sosial. Sedangkan kepentingan struktural ialah tujuan-tujuan

---

<sup>5</sup> Rosana, E. 2015. "Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)". *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol.10, No.2, hlm. 217.

<sup>6</sup> Utsman, S. 2007. "*Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan: Sebuah Penelitian Sosiologis*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.17.

yang akan dicapai oleh seorang atau kelompok terkait dengan posisi-posisi dalam organisasi.<sup>7</sup>

Dalam konflik terdapat unsur atau bagian yang mempengaruhi terjadinya suatu konflik yaitu penyebab konflik terjadi, siapa yang berkonflik, bagaimana konflik terjadi, dampak dari terjadinya konflik, dan penyelesaian konflik seperti apa yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik, hal ini disebut sebagai anatomi konflik. Untuk memahami konflik diperlukan pemetaan konflik. Pemetaan konflik menurut Simon Fisher merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis dengan menghubungkan satu masalah dengan berbagai pihak. Pemetaan konflik dapat membantu menggambarkan konflik secara grafis yang berguna untuk melihat secara menyeluruh aktor-aktor konflik dan juga hubungan-hubungannya. Dalam konflik yang berskala besar, pada dasarnya akan banyak aktor-aktor yang terlibat, apabila dipetakan masing-masing aktor-aktor tersebut mempunyai peran sendiri terhadap konflik. Aktor-aktor tersebut masuk ke dalam aktor di balik layar. Yang menjadi sorotan utama dalam suatu konflik ialah dua pihak yang bertindak sebagai aktor utama yang berlawanan. Dalam memetakan konflik terdapat beberapa tujuan pokok, yaitu untuk dapat memahami situasi yang lebih baik, untuk melihat hubungan di antara berbagai pihak dengan jelas, untuk mendeskripsikan dimana letak kekuasaan, dan menyimpulkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh tiap-tiap aktor

---

<sup>7</sup> Afrizal. *Op.cit*, hlm.5-6.

konflik.<sup>8</sup> Salah satu konflik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ialah konflik pembangunan.

Pembangunan merupakan proses dalam mengubah suatu keadaan masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup negara, daerah dan juga desa yang mana membutuhkan pembangunan bersifat fisik dan nonfisik. Pembangunan sederhananya berarti suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara teratur dan alami.<sup>9</sup> Pembangunan menurut Siagian adalah sebagai suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah.<sup>10</sup> Salah satu jenis pembangunan fisik ialah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai roda penggerak laju dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pada umumnya pembangunan selalu menghasilkan dampak yang positif dan negatif. Salah satu komponen penting dalam pembangunan ialah kemajuan ekonomi. Pembangunan tidak semata-merta diartikan secara sempit dari aspek peningkatan kemakmuran manusia secara material dan finansial saja, namun pembangunan juga harus dilihat sebagai suatu proses *multidimensional* yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

---

<sup>8</sup> Darmawan, I., & Abidin, Z. 2017. "Pemetaan Konflik Sosial Masyarakat Di Aceh Selatan (Studi Deskriptif Konflik Sosial Masyarakat Di Mukim Alue Paku Kecamatan Sawang)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 1, hlm.4.

<sup>9</sup> Kato, I., Farida, A. Revida, E., Daminik, D., Siregar, R. T., Purba, S., ... & Weya, I. 2021. "*Manajemen Pembangunan Daerah*". Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pelaksanaan pembangunan daerah ialah meningkatnya pendapatan daerah, dan juga menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. Dalam era otonomi daerah tujuan utama dari pembangunan daerah ialah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dan keseluruhan warga negara. Dari banyak kasus pembangunan yang terjadi di Indonesia seringkali diwarnai dengan konflik. Seperti konflik pembangunan pabrik semen yang terjadi di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, selanjutnya konflik pada pembangunan pasar di Desa Sumowono di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, konflik pada lahan pertanian dalam pembangunan Bandara Internasional di Kulon progo, dan konflik pada pembangunan pasar di Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoardjo, kasus serupa juga terjadi di Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi pada awal tahun 2022 telah merencanakan pembangunan yakni pembangunan kanopi yang berlokasi di sepanjang Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi. Aturan tata cara dalam pembangunan kanopi ini sudah tertulis di dalam Peraturan Wali kota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembuatan Kanopi.<sup>11</sup> Namun rencana pembangunan kanopi tersebut ternyata

---

<sup>11</sup> Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembuatan Kanopi

mengundang sejumlah perdebatan yang pada akhirnya membagi masyarakat ke dalam dua kubu yang saling bertentangan yaitu pro dan kontra. Kelompok yang terpecah tersebut masing-masing mempunyai alasan dan juga pembenaran. Kanopi sendiri diartikan sebagai bangunan yang didirikan menempel pada bangunan dan memiliki atap, atap tersebut dapat memberikan keteduhan dari sinar cahaya matahari atau air hujan.<sup>12</sup> Pembangunan kanopi ini bertujuan agar pedagang kaki lima yang berjualan di area Pasar Atas lebih tertata dan juga agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Perencanaan pembangunan kanopi tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana Pemerintah Kota Bukittinggi yang sudah disepakati bersama dengan DPRD untuk diselenggarakan, tujuan dari pembangunan ini ialah untuk menata kawasan wisata Jam Gadang.<sup>13</sup> Pembangunan kanopi ini sebelumnya dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi. Walaupun pembangunan kanopi ini telah dirancang, akan tetapi masih terdapat beberapa pihak yang menolak yakni pedagang dan pemilik toko di Jalan Minangkabau serta Niniak Mamak Pangka Tuo Nagari Limo Jorong. Selain dari beberapa pihak yang menolak, terdapat juga pihak yang mendukung akan terjadinya pembangunan ini, yakni Forum Kecil Warga Kota Bukittinggi (FKWKB) serta pemenang tender pembangunan kanopi tersebut. Pembangunan kanopi ini juga merupakan salah satu janji kampanye dari Erman Safar dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Bab I pasal 1 No. 4

<sup>13</sup> Scientia. 2022. Tan Marajo “Sepanjang Jalan Minangkabau Akan Dibangun Kanopi dan Pasar Malam”. Selengkapnya di <https://scientia.id/2022/01/24/sepanjang-jalan-minangkabau-akan-dibangun-kanopi-dan-pasar-malam/amp/> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

penataan pedagang kecil dan usaha UMKM lainnya dan juga agar dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke Kota Bukittinggi.<sup>14</sup>

Dari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat lima penelitian yang fokus isunya tentang pemetaan konflik, adapun penelitiannya adalah: *Pertama*, penelitian dari Lucyana Trimo,<sup>15</sup> *kedua* penelitian dari Nella Sri Astis,<sup>16</sup> *ketiga*, penelitian dari Bismar Arianto,<sup>17</sup> *keempat*, penelitian Agus Sjafari,<sup>18</sup> *kelima*, Penelitian dari Muchammad Ismail.<sup>19</sup> Dari beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan tersebut lebih membahas mengenai konflik antara perusahaan dengan masyarakat lainnya serta pada penelitian terdahulu teori yang digunakan tidak memetakan konflik secara kompleks. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat juga pada penelitian ini memetakan konflik pada saat pembangunan masih direncanakan atau pembangunan tersebut belum terlaksana serta pada penelitian ini menggunakan teori SIPPABIO yang mana masih belum banyak penelitian yang lain menggunakan teori ini dan dengan menggunakan teori SIPPABIO ini akan mendapatkan pemetaan konflik yang jauh lebih kompleks dibandingkan pada penelitian sebelumnya. Hal tersebut menjadi sebuah kebaruan di dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Trimo, L. 2016. "Pemetaan Konflik Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat Sekitar". *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*. Vol. 1 No. 1

<sup>16</sup> Nella Sri Astis Sufatmi, N. S. A. S. 2018. "*Pemetaan Konflik Tenurial Dikawasan Hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani*". Tesis. Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram

<sup>17</sup> Arianto, B. 2021. Pemetaan Konflik Pada Pengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.1

<sup>18</sup> Sjafari, A. (2017). Pemetaan Konflik Sosial di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, Vol.2, No.2

<sup>19</sup> Ismail, M. 2011. Pemetaan dan Resolusi Konflik (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo). *The Sociology of Islam*, Vol.1, No.1

## 1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut menarik peneliti untuk mencari beberapa data yang dapat membantu peneliti dalam merumuskan permasalahan, bermula ketika Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengumumkan bahwasannya Pemerintah Kota Bukittinggi akan membangun kanopi dan pasar malam di sepanjang Jalan Minangkabau. Perencanaan pembangunan kanopi tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana Pemerintah Kota Bukittinggi yang sudah disepakati bersama dengan DPRD untuk diselenggarakan dengan tujuan untuk menata kawasan wisata Jam Gadang dan juga menciptakan kawasan ekonomi baru untuk masyarakat Kota Bukittinggi.<sup>20</sup> Jalan Minangkabau sendiri pada awalnya hanya dipergunakan untuk lalu lintas para wisatawan atau para pengendara mobil dan sepeda motor dan juga sebagai *icon* bersejarah Kota Bukittinggi yang menjadi jalan penghubung antara Kebun Binatang dan Jam Gadang.

---

<sup>20</sup> Padek Jawa Pos. 2022. Hendra Efison “Diskusi Andre dan Erman Safar, Awning Jl Minangkabau Bukittinggi Ditunda” Selengkapnya di <https://padek.jawapos.com/sumbar/bukittinggi/19/10/2022/diskusi-andre-dan-erman-safar-awning-jl-minangkabau-bukittinggi-ditunda> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022

**Gambar 1.1**  
**Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi**



*Sumber: <https://klikpositif.com/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB*

Pernyataan dari Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar tersebut menuai berbagai pro dan kontra. Salah satunya berita yang dilansir dari Sumbar Antara News bahwasannya puluhan pedagang yang terdapat di dalam perkumpulan Syarikat Pedagang dan pemilik toko Jalan Minangkabau membenteng poster dan menempelkan stiker penolakan di sepanjang jalan utama menuju Jam Gadang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Juru bicara Syarikat Pedagang, Muhammad Fadhli mengatakan, “Pembangunan kanopi ini menghadirkan banyak mudharat, kami berharap Wali Kota mendengarkan kami dan rencana ini dibatalkan”.<sup>21</sup> Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah.

<sup>21</sup> Antaranews.com. 2022. Alfatah “Pedagang Pasar Atas Bukittinggi Tolak Rencana Pemkot Bangun Kanopi” Selengkapnya di <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/483053/pedagang-pasar-atas-bukittinggi-tolak-rencana-pemkot-bangun-kanopi> Diakses pada tanggal 10 Juli 2022

**Gambar 1.2**  
**Spanduk penolakan Serikat Jalan Minangkabau**



*Sumber: Dokumentasi peneliti Tahun 2022*

Penolakan tersebut terjadi karena para pedagang menganggap bahwa pembangunan kanopi di sepanjang Jalan Minangkabau ini memiliki banyak mudharat. Selain itu faktor yang membuat beberapa pedagang menolak rencana pembangunan kanopi ini ialah masyarakat merasa bahwasannya pemerintah tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para pedagang terkait pembangunan kanopi di sepanjang Jalan Minangkabau ini, dengan tidak terdapatnya musyawarah tersebut memberikan kesan buruk.<sup>22</sup> Selain dari para pemilik toko di Jalan Minangkabau, para pemegang kuasa adat yang tergabung dalam Niniak Mamak Pangka Tuo Nagari Kurai Limo Jorong juga menyampaikan pernyataan serupa yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bukittinggi terkhusus rencana pembuatan

<sup>22</sup> *ibid*

kanopi di Jalan Minangkabau. Seperti yang disampaikan oleh Datuak Rangkayo

Basa:

“Kami menyayangkan tidak adanya komunikasi, sejak 20 Februari kami ingatakan hendaknya *Mangaruak Sahabih Gauang*, ternyata tidak dilakukan oleh Pemerintah kota Bukittinggi, bahkan tidak ada upaya untuk bermusyawarah (*Ba iyo iyo*) dengan kami Masyarakat Hukum Adat Kurai Limo Jorong”.<sup>23</sup>

Konflik Pembangunan kanopi ini juga sudah menggelar beberapa kali sosialisasi dengan mendatangkan para pedagang dan juga wali kota. Berdasarkan hasil sosialisasi kanopi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni tahun 2022 di Hall Balai Kota Gulai Bancah menghasilkan 16 poin, salah satunya ialah pembangunan kanopi ini dianggap telah melanggar UU Pemerintahan Daerah No.23 Tahun 2014 pasal 76 (Larangan Bagi Kepala Daerah) terdapat pada ayat 1(a) yakni membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1(b) membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi pelanggaran maka berujung kepada pemecatan kepala daerah, dengan proses yang juga diterangkan

<sup>23</sup> Antaranews.com. 2022. Al Fatah “Niniak Mamak Kurai Bukittinggi Tolak Pembangunan Awning Jalan Minangkabau” Selengkapnya di <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/531945/niniak-mamak-kurai-bukittinggi-tolak-pembangunan-awning-jalan-minangkabau> Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022

dan dijamin dalam UU tersebut.<sup>24</sup> Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Fadhil selaku ketua Serikat Jalan Minangkabau.

**Gambar 1.3**  
**Rancangan pembangunan kanopi di sepanjang Jalan Minangkabau**



Sumber: <https://katasumbar.com/> diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

Selain dari pihak yang tidak menyetujui pembangunan kanopi, terdapat kelompok masyarakat dan pedagang di Jam Gadang yang menamakan dirinya sebagai Forum Kecil Warga Kota Bukittinggi (FKWKB) yang menyetujui kebijakan dari pemerintah dengan dibangunnya kanopi ini. Dikutip dari Sumbar Antaranews yang mengatakan bahwasannya “Kami sekitar 300 orang pedagang kecil dan warga menyatakan setuju dengan rencana Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendirikan *awning*/ kanopi di Jalan Minangkabau, ada tiga tuntutan kami kepada pemerintah dan DPRD”.<sup>25</sup> Tiga tuntutan yang diminta oleh para pedagang kepada pemerintah dan DPRD yaitu pertama, dukungan agar Pemerintah Kota Bukittinggi mendirikan kanopi dan night market. Kedua, meminta DPRD terus

<sup>24</sup> Sjalanminangkabaubukittinggi. 2022. “Hasil sosialisasi kanopi dan permintaan tindak lanjut kepada DPRD Bukittinggi” Selengkapnya di <https://www.instagram.com/p/Cfl3nWPPGOB/> Diakses pada tanggal 11 Juli 2022

<sup>25</sup> Kata sumbar. 2022. Hatta Rizal “Forum Warga Biasa Gelar Aksi Dukung Pemerintah Bangun Kanopi di Jalan Minangkabau” Selengkapnya di <https://katasumbar.com/forum-warga-biasa-gelar-aksi-dukung-pemerintah-bangun-kanopi-di-jalan-minangkabau/> Diakses pada tanggal 11 Juli 2022

mengawal proses pelaksanaan dan dipastikan berjalan. Ketiga, meminta dengan kerendahan hati agar seluruh masyarakat mendukung kebijakan pemerintah. Selain dari beberapa pedagang yang menyetujui dengan kebijakan pemerintah, begitu pula Camat Guguk Panjang, Yelrizon yang juga mendukung semua pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Ini merupakan upaya pemerintah kota untuk menata keindahan kota, supaya pengunjung yang datang merasa nyaman dan akan terus bertambah. Tentu efeknya adalah dagangan pelaku UMKM seperti kuliner, aksesoris dan lainnya akan laku dan taraf ekonomi akan meningkat”.<sup>26</sup>

Terdapat banyak pihak yang terlibat di dalam konflik ini, pertama yaitu para pemilik toko di Jalan Minangkabau yang bernama Serikat Jalan Minangkabau, selanjutnya Niniak Mamak Pangka Tuo Nagari Kurai Limo Jorong. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang menolak pembangunan kanopi ini dilaksanakan. Selain itu juga terdapat pihak-pihak yang mendukung pembangunan ini dilakukan yaitu para masyarakat dan pedagang Jam Gadang, Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Berdasarkan pernyataan di atas menarik peneliti untuk meneliti dan menelaah dalam memetakan konflik yang terjadi pada pembangunan kanopi di sepanjang Jalan Minangkabau. Dalam riset ini peneliti berasumsi bahwa konflik terjadi karena lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak terdampak. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Kota Bukittinggi yang tidak melibatkan pihak terdampak dalam pembuatan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Fadhil bahwa rencana pemerintah

---

<sup>26</sup> Scientia. 2022. Tan Marajo “Sepanjang Jalan Minangkabau Akan Dibangun Kanopi Dan Pasar Malam” Selengkapnya di <https://scientia.id/2022/01/24/sepanjang-jalan-minangkabau-akan-dibangun-kanopi-dan-pasar-malam/> Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022

Kota Bukittinggi tidak dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan para pedagang. Sejalan dengan teori Abdallah dengan model SIPPABIO dalam buku *A Model for Conflict Analysis* yang mengatakan bahwa komunikasi dapat menjadi salah satu sumber konflik, karena konflik akan dapat diselesaikan apabila dapat menjaga arus komunikasi.<sup>27</sup> Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan peneliti pada penelitian ini adalah bagaimana pemetaan konflik pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi Tahun 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menganalisis pemetaan konflik pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi Tahun 2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi kepada pembaca mengenai pengetahuan politik yang terkhususnya dalam pemetaan konflik pembangunan daerah, dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman penelitian tambahan kepada peneliti yang lain di masa yang akan datang.

---

<sup>27</sup> Abdallah, A., & Sender, M. 2019. *CR SIPPABIO: A Model for Conflict Analysis*, hlm. 35.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan perencanaan pembangunan agar tidak terdapatnya konflik.

